

Deklarasi Konferensi Nasional Pendidikan Bencana 2017

**“Pendidikan Bencana Era Kerangka Kerja
Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana
2015-2030”**

Magelang, Jawa Tengah, 22-24 Agustus 2017

“Pendidikan Bencana Era Kerangka Kerja Sendai untuk PRB 2015-2030”

Kami, peserta Konferensi Nasional Pendidikan Bencana Ke-2 tentang “Pendidikan Bencana Era Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030”. Kami telah berdiskusi dan bermusyawarah pada 22 s/d 24 Agustus 2017 di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kami menyadari dampak meningkatnya kejadian bencana dan kompleksitasnya di seluruh Indonesia. Kami bertekad meningkatkan upaya Pendidikan Bencana untuk mengurangi kerugian akibat dampak bencana, kehidupan, dan aset di seluruh Indonesia.

Kami menghargai peran penting pemerintah, lembaga donor, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemanusiaan berbasis agama dan dunia usaha yang telah mendukung dan melakukan pendidikan bencana sampai saat ini. Kami juga menghargai keterlibatan aktif para pendidik, siswa, anak berkebutuhan khusus, dan masyarakat yang menyambut baik inisiatif Pendidikan Bencana. Secara khusus kami menghargai organisasi disabilitas dan para relawan yang bekerja tanpa kenal lelah dalam Pendidikan Bencana.

Dalam refleksi bersama, kami masih menemukan banyak kesenjangan dalam Pendidikan Bencana di negeri rawan bencana ini. Kesenjangan yang kami temui terutama di kebijakan, program, anggaran, dan indikator kinerja serta sinergi antara kementerian/lembaga, antaihak, antarsektor, dan antartingkatan. Dalam kunjungan lapangan dan diskusi, kami juga menyadari ada permasalahan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan praktik Pendidikan Bencana.

Kami merekomendasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya untuk: 1. Menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek & Dikti), dan kementerian/lembaga tentang Pendidikan Bencana. 2. Menerbitkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menristek & Dikti dan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pendidikan Bencana dan pembiayaannya. 3. Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang aman dan aksesibel untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 4. Membentuk Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) di tiap kabupaten/kota. 5. Membentuk Sekolah Madrasah Darurat Teadu sebagai wujud sekolah bersaudara (sister school) yang terintegrasi dalam program SMAB. 6. Mendorong dunia usaha lebih banyak terlibat aktif dalam Pendidikan bencana. Kerangka kerja dan rekomendasi selengkapnya terlampir.

Kami berterima kasih kepada panitia penyelenggara, sekolah dan kelompok masyarakat yang dikunjungi, Pemerintah Republik Indonesia serta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang sebagai tuan rumah Konferensi Nasional Pendidikan Bencana ke-2 Tahun 2017 tentang “Pendidikan Bencana dalam Era Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030”. Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas komitmennya untuk memajukan pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan global.

Magelang, 24 Agustus 2017

Lampiran 1

1. Kondisi pendidikan bencana di Indonesia

1. Sebelum tahun 2004 KEMDIKBUD, KEMENAG, dan KEMENRISTEK DIKTI belum serius menangani Pendidikan bencana.
2. Pendidikan bencana menjadi pintu masuk pemenuhan hak anak.
3. Pendidikan bencana belum menyeluruh diberikan di daerah yang rawan bencana.
4. Analisis ancaman dan risiko bencana belum dilakukan di setiap kabupaten/Kota
5. Kebijakan terkait Pendidikan Bencana SMAB belum maksimal
6. Belum semua sekolah tersosialisasi Pendidikan Bencana SMAB

2. Permasalahan

Kesulitan untuk mensosialisasikan sekolah aman karena bukan syarat akreditasi dan tidak menjadi prioritas

1. Pelaksanaan Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) belum komprehensif, memenuhi ketiga pilar.
2. Kesadaran sekolah terutama guru rendah, karena beban Pendidikan dan administrasi Pendidikan dirasakan terlalu banyak. Jadwal Pendidikan di sekolah yang sudah ada terasa padat.
3. Masih ada anggapan masyarakat bahwa bencana adalah takdir Tuhan yang tidak bisa diubah
4. Sekolah masih tergantung dari bantuan dana pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjalankan Pendidikan bencana
5. Kurangnya pemahaman prosedur tetap (PROTAP/SOP)
6. Site plan bangunan sekolah yang rawan bencana
7. Kurang kesadaran komunitas sekolah
8. Kurangnya anggaran Pusat dan Daerah
9. Kurangnya dukungan dari kementerian terkait KEMENAG, KEMENDIKBUD, dan KEMENRISTEK DIKTI serta Kementerian/Lembaga lain
10. Kurangnya peningkatan kapasitas diri tentang Pendidikan Bencana
11. Sekolah-sekolah yang mampu tidak menganggap penting keamanan sekolah
12. Dalam pelaksanaan sekolah aman inklusi kadang guru dan siswa di beberapa daerah belum memahami bahasa isyarat (tuna rungu)
13. Pelaksanaan pada sekolah inklusi guru juga belum punya kemampuan penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) termasuk untuk pembelajaran pendidikan bencana
14. Pelaksanaan SMAB oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum maksimal menyasar sekolah-sekolah di lokasi rawan bencana seperti longsor (ancaman longsor bukan prioritas)
15. Akreditasi Sekolah belum banyak menyentuh Pendidikan Bencana
16. Banyak sekolah yang belum aksesibel untuk ABK dan untuk Pengurangan risiko bencana

3. Pembelajaran

1. Pelaksanaan SMAB dengan panduan 3 pilar dan dimodifikasi sesuai kebutuhan di sekolah
2. Di Karangobar Banjarnegara ancaman longsor pelaksana SMAB dengan 3 pilar faktanya harus memindah sekolah ke tempat aman.
3. Sekolah Cerdas menggabungkan antara ancaman bencana alam dan sosial
4. Kesadaran stakeholder di desa mendukung program sekolah aman di sekolah-sekolah yang berada di desa yang mempunyai ancaman erupsi gunungapi banyak stakeholder yang terlibat pelaksanaan SMAB
5. Mukthamar Adven yang memasukkan isu kebencanaan
6. Pengalaman di Philippine, PRB masuk dalam kurikulum, namun hanya 10% yang melakukan kegiatan dengan alasan pendanaan dan pengetahuan
7. Ada lembaga menyasar 81 sekolah di kabupaten Magelang (SLB, SD, MI) yang melakukan praktik di sekolah, monitoring dan evaluasi.

8. Pendidikan non dan informal perlu dipadukan dengan program ekonomi dan lingkungan untuk menjamin keberlangsungannya
9. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program.
10. Pendidikan bencana di PONPES dilakukan dengan pendekatan agama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah tersebut
11. Pendidikan di PAUD lebih luwes karena belum ada tuntutan mata pelajaran seperti SD atau SMP, sehingga memudahkan guru melakukan Pendidikan bencana ke anak-anak.

4. Tantangan

1. Sekolah aman tidak masuk dalam indikator akreditasi sekolah. Penilaian akreditasi masih pada manajemen, administrasi dan kurikulum sekolah
2. Kapasitas guru memfasilitasi ABK untuk sekolah aman atau pendidikan bencana belum memadai sehingga butuh pelatihan
3. Pelaksana SMAB masih kurang pada pilar 1 untuk pemenuhan saras sekolah aman, karena berbiaya mahal dan dukungan banyak pihak
4. Integrasi Pendidikan Bencana kedalam kurikulum masih sulit dilaksanakan lebih banyak pilihannya pada ekstrakurikuler pramuka. Kendalanya tidak ada kebijakan di atasnya, pengetahuan pengintegrasian kurikulum masih kurang
5. Keterbukaan informasi di sekolah mengenai implementasi SMAB contohnya dalam pembangunan infrastruktur, misalnya penggunaan dana BOS sudah dimulai oleh Yayasan Air Putih
6. Integrasi Pendidikan Bencana kedalam kurikulum sudah dilaksanakan sejak 2010 namun masih kesulitan karena sekolah sudah banyak muatan integrasi dan guru belum paham bagaimana cara memasukkan dalam integrasi dan bagaimana mengimplementasikannya nantinya dalam pembelajaran. Belum semua standar akreditasi sebenarnya belum dilaksanakan oleh sekolah
7. Mengkampanyekan aksesibilitas saras dan tenaga pendidik di sekolah-selolah untuk ABK dan yang aman bencana (inklusi Pendidikan Bencana)

5. Peluang

Pelaksanaan SMAB inklusi dengan kegiatan pelatihan serta implementasi di sekolah.

1. Di kabupaten Magelang sudah ada Desa Bersaudara (sister village) yang akan dipadukan dengan sekolah, memodifikasi modul MDMC
2. Di Sleman sudah menginisiasi Sekolah Penyangga (Sister School) antara sekolah terdampak langsung dan sekolah yang ketempatan.
3. Inisiatif sekolah Cerdas MDMC tidak hanya menangani sekolah aman bencana alam, tetapi juga bencana social seperti bullying/tawuran. Sudah ada pilot project dan modul serta siap direplikasi di seluruh Indonesia.
4. Membangun kerjasama kemitraan sekolah dan lembaga luar/LSM untuk pendampingan
5. Integrasi dengan ekstra kurikuler (HW - Hisbul Wathan)
6. Sudah ada panduan teknis SMAB di tingkat nasional
7. Ada dukungan pemerintah
8. Kondisi sekolah setempat yang kondusif.
9. Minat siswa tinggi dalam siaga bencana
10. Ada kajian keagamaan tentang alam

6. Praktik baik:

Membangun budaya aman bencana melalui 8 standar Pendidikan bencana

1. Sekolah inisiatif bergerak sendiri mencari pendampingan
2. Kegiatan Pendidikan bencana mandiri di sekolah, tidak membebani keluarga dengan tambahan biaya
3. SMAB inklusif disabilitas sudah dilakukan.

4. Dukungan pimpinan sekolah menjadi penting pelaksanaan sekolah aman
5. Implementasi sekolah aman dengan melibatkan lingkungan sekitar dan memunculkan kepedulian sekitar terhadap sekolah² melibatkan banyak pihak
6. Ada homeschooling untuk sekolah aman (daerah Kendal) atas permintaan orang tua
7. Intensif membentuk fasilitator-fasilitator lokal untuk SMAB
8. Dukungan pelaksanaan SMAB menggunakan fiqih kebencanaan
9. Organisasi keagamaan sudah memasukkan pembelajaran bahasa isyarat dalam kurikulum
10. Integrasi sekolah adiwiyata (lingkungan) dan Pendidikan Bencana menjadi daya dukung masuknya dalam akreditasi
11. Di kabupaten Magelang telah muncul kelompok-kelompok peduli disabilitas dan bisa menjadi daya dukung
12. Integrasi antara sekolah aman dan desa tangguh.
13. Menyatakan dengan jelas mitigasi bencana dalam visi dan misi, mata kuliah dan standar kompetensi lulusan
14. Mendirikan Pusat Studi Bencana dan Riset Dosen
15. Penekanan kompetensi lulusan tentang kebencanaan.
16. Madrasah menerapkan siaga bencana alam dan sosial makin kondusif
17. Label SMAB membantu akreditasi sekolah

Peta jalan (Roadmap) tentang Pendidikan Bencana

1. Pendidikan formal: meningkatnya peran lembaga Pendidikan dalam melaksanakan sekolah SMAB (90%) pada tahun 2026-2030 Perilaku siaga bencana sudah menjadi budaya di SMAB

Kebijakan yang beihak pada SMAB

Peningkatan kapasitas SDM dan SDA Meningkatnya partisipasi pihak ke 3

- UU, Peraturan pemerintah
- Kurikulum Integrasi dalam mata pelajaran dan ekstra kurikuler
- Pelatihan SMAB bagi warga sekolah
- Kelengkapan fasilitas
- Implementasi Pendidikan bencana terintegrasi sekolah, masyarakat, pemerintah
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga ² Kemitraan KPB daerah

Rencana Pendidikan Formal Program Pendidikan Bencana Tahun 2020-2025 Sasaran nasional:

Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dan sedang.

Tujuan (arah kebijakan):

1. Menurunkan risiko bencana di seluruh provinsi (10—50%)
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, PEMDA dan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Penyediaan sarana prasarana penunjang Pendidikan bencana baik di lingkungan Pendidikan maupun di masyarakat.

Strategi:

1. Di tingkat masyarakat: peraturan desa yang mengatur tentang risiko bencana
2. Di tingkat sekolah (dinas/untuk sekolah/UPTD): membuat kebijakan terkait ancaman bencana di lingkungan. Kebijakan di provinsi/PERGUB/SK GUB.
3. Peningkatan anggaran APBD Provinsi untuk Pendidikan bencana
4. Transparansi akses informasi untuk seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan/konsorsium daerah

Rencana Pendidikan Formal Program Pendidikan Bencana Tahun 2017-2019

Tujuan: Terlaksananya Pendidikan sekolah aman bencana di seluruh provinsi Indonesia dengan capaian 10% di setiap provinsi.

Tahun 2017:

1. Pembentukan konsorsium daerah dengan pihak terkait.
2. Sosialisasi modul
3. Peningkatan kapasitas relawan

Tahun 2018: penyusunan kebijakan.

1. APBD 5% untuk Pendidikan bencana
2. SK Bupati/Walikota/Gubernur, PERMEN, dll
3. Memasukkan materi kebencanaan dalam kurikulum/mata kuliah FKIP – perguruan tinggi (calon guru)

Tahun 2019: penguatan implementasi di tingkat sekolah

1. Pelatihan – warga sekolah
2. Kajian risiko
3. Integrasi Pendidikan Bencana dalam kurikulum
4. Integrasi Pendidikan Bencana dalam ekstra kurikuler.

2. Perguruan Tinggi

Visi 2019-2030 – terbangunnya visi dan misi perguruan tinggi di Indonesia yang mengarah pada Pendidikan bencana.

3. Madrasah

a. Tahun 2017-2019

1. Sosialisasi SMAB 20%
2. Data dasar SMAB (kajian risiko bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana di sekolah)
3. Penentu kebijakan sudah paham SMAB dan mengimplementasikannya
4. SMAB menjadi indicator akreditasi sekolah
5. SK Bersama Kementerian dan Lembaga tentang SMAB

b. Tahun 2020-2025

1. Ada 50% Sekolah/Madrasah sudah menerapkan SMAB
2. Ruang kegiatan belajar wajib menerapkan konsep aman bencana
3. Pemegang kebijakan sudah paham SMAB dan melaksanakannya
4. Pendidikan bencana sudah terintegrasi dalam kurikulum SMAB
5. SMAB menjadi indicator akreditasi sekolah
6. Muncul SK Bersama kementerian dan lembaga tentang SMAB

c. Tahun 2026-2030

1. Pendidikan PRB berjalan dengan baik di seluruh jenjang Pendidikan
2. Sarana prasarana sekolah/madrasah sesuai dengan PRB
3. Tata ruang sekolah yang siaga bencana
4. Seluruh kementerian terkait sudah peduli tentang PRB
5. Adanya jaminan social untuk relawan dan keluarganya
6. Pendidikan Indonesia mempunyai sikap siaga bencana
7. Deklarasi Indonesia Tidak Takut Bencana

4. Pendidikan Anak Usia Dini 2017-2019; 2020-2025; 2026-2030

Program/ kegiatan	2017-2019	2020-2025	2026-2030
1. Internalisasi PRB			
a. Adanya media pembelajaran (cerita, lalu, main peran)	+	+	+
b. Isu Pendidikan Bencana ada dalam pembelajaran di PAUD	+	+	+
c. Adanya partisipasi orang tua siswa	+	+	+
2. Penurunan Kerentanan	+	+	+
a. Adanya kesiapsiagaan sekolah	+	+	+
b. Adanya penataan ruangan kelas	+	+	+
c. Adanya bangunan sekolah PAUD yang aman	+	+	+
3. Peningkatan kapasitas			
a. Adanya kerjasama dengan pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas PAUD	+	+	+
b. Ada forum untuk berbagi pengalaman dengan kelompok guru (HIMPAUDI, KKG, IGTKI, PKG)	+	+	+

Pendidikan Non formal dan informal

Strategi 1

1. Adanya Pendidikan Bencana dalam JMDes 2017-2019
2. Adanya adanya sosialisasi Pendidikan Bencana di tingkat masyarakat, sekolah dan pesantren
3. Adanya tata ruang yang terintegrasi dengan system Pendidikan Bencana tahun 2020-2025 dan dalam PERDES 2025-2030
4. Adanya kontinjensi sesuai dengan kondisi desa dengan ancaman yang ada 2020-2025 dan integrasi Pendidikan Bencana dimasukkan dalam metode pembelajaran dalam pesantren

Strategi 2

1. Adanya forum desa untuk meneambah dan mengembangkan sadar bencana kepada masyarakat
2. Adanya Pendidikan Bencana di dalam kegiatan masyarakat
3. Adanya stiker, spanduk, medsos, papan informasi di desa atau koran
4. Penguatan pemberdayaan ekonomi local
5. Penanaman kesadaran dalam lingkungan hidup

Strategi 3

1. Adanya Pendidikan dan pelatihan PRB bagi perangkat desa
2. Adanya rencana kontinjensi bagi perangkat desa atau pesantren sekolah
3. Adanya tim yang mampu menggunakan alat komjunikasi
4. Warga masyarakat mampu mengelola pengungsian
5. Adanya gotong royong masyarakat dalam melakukan evakuasi
6. Adanya replikasi Pendidikan bencana antar warga

Dari hal-hal di atas, peserta menyepakati rekomendasi-rekomendasi di bawah ini.

Secara umum peserta KONAS PB merekomendasikan agar inisiatif Pendidikan bencana yang sudah ada dilakukan secara terus menerus, diulang, dipertahankan, dibangun jejaring antar peserta didik,

permainan yang sesuai pengurangan risiko bencana, Pendidikan bencana pada anak menggunakan lagu anak, memelihara semangat dan dilakukan evaluasi.

Rekomendasi Rekomendasi untuk pemerintah pusat

1. Kemendikbud

- Menerbitkan PERMEN tentang Pendidikan Bencana.
- Memasukkan isu Pendidikan Bencana ke dalam semua Direktorat.
- Menaikkan anggaran Pendidikan Bencana hingga minimal 2%
- Memasukkan anggaran dalam pos dana BOS untuk Pendidikan Bencana
- Menjadikan SMAB sebagai indikator penilaian akreditasi sekolah.

2. Kemenag

- Menerbitkan PERMENAG tentang Pendidikan Bencana
- Melibatkan Pemuka Agama sebagai salah satu fasilitator dalam Pendidikan Bencana
- Membuat Modul tentang Pendidikan Bencana berbasis Agama
- Mengintegrasikan Pendidikan Bencana kedalam Pendidikan Agama
- Menjadikan SMAB sebagai indikator penilaian akreditasi madrasah.

3. Kemenristek Dikti

- Menerbitkan PERMEN tentang Pendidikan Bencana
- Memasukkan kurikulum pendidikan kebencanaan dalam pendidikan tinggi khususnya untuk mahasiswa calon guru
- Mendirikan Pusat Studi Manajemen Bencana di perguruan tinggi terkait.
- Melakukan penelitian dan pemetaan tentang daerah rawan bencana.
- Melakukan sosialisasi hasil penelitian dan pemetaan secara benar dan tepat.
- Menjadikan Perguruan Tinggi Aman Bencana sebagai indikator penilaian akreditasi Perguruan Tinggi.

4. BNPB

- Meningkatkan kemampuan warga sesuai identifikasi ancaman bencana lokal.
- Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat secara komprehensif.
- Penambahan EWS (early warning system) untuk titik-titik rawan.
- Kapasitas relawan untuk masing-masing wilayah terhadap pemahaman pra bencana.

5. Kementerian BUMN

- Mengintruksikan kepada BUMN untuk mengalokasikan dana bina lingkungan untuk pendidikan Bencana.

6. Bappenas

- Mengintegrasikan Pendidikan Bencana ke/prioritas dalam JM/JP

7. Kemendes

- Kebijakan penggunaan anggaran dana desa untuk Pendidikan Bencana

8. Kementerian/Lembaga

- Menerbitkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Pendidikan Bencana di sekolah kedinasan.
- Menjadikan Pendidikan Bencana sebagai indikator penilaian akreditasi lembaga/instansi.

Kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

1. Menerbitkan peraturan kepala daerah tentang penerapan SMAB dan penganggarannya
2. Mendesak adanya kebijakan (penggunaan anggaran untuk pendidikan bencana) yang berkaitan dengan pendidikan bencana di kebijakan tingkat kabupaten
3. Mengalokasikan dana untuk pendidikan bencana minimal 2% dari APBD.
4. Mendorong kemandirian desa dalam pendidikan bencana
5. Koordinasi yang intensif terhadap pelaksanaan pendidikan bencana
6. Peningkatan kapasitas keilmuan untuk pejabat SKPD dan UPTD
7. Dalam mutasi jabatan di SKPD harus mempertimbangkan kesinambungan program yang ada di SKPD (berkaitan dengan pendidikan bencana)
8. Memberikan penyuluhan yang kontinyu
9. Memastikan adanya pendidikan bencana di sekolah-sekolah

Magelang, 24 Agustus 2017

Tim Perumus

Lampiran 2

Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB)

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah kebijakan	Indikator Terukur
T1. Kurikulum PRB	SS 1. Melibatkan LPMP Memasukan PRB sebagai mata kuliah wajib di FKIP	T1 SS1 Wajib dimasukkannya kurikulum pendidikan PRB Mendorong terbitnya permen untuk penerapan SMAB	T1. Akreditasi Supervisi/monitoring KKN tematik PRB
T2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sektor pendidikan yang aman terhadap bencana yang inklusif dan berperspektif gender Gedung sekolah yang aman dan ksesibel	T2. SS2. Dilibatkannya PT/BPBD, lembaga SNI bangunan, PU untuk merekomendasikan IMB bagi gedung sekolah	T2. SS2 UU no 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak disabilitas Convention Right for People with Disability	T2. SS1 Terpenuhinya kebutuhan mendasar ragam disabilitas, guiding book do fasilitas umum, ram, tenaga juru bahasa isyarat, ethapioning, running text di tv Adanya video pembelajaran pendidikan mitigasi bencana dengna bahasa isyarat indonesia Adanya modul pelatihan berbasis braille IMB gedung yang aman dan aksesibel masuk dalam akreditasi. Ada monitoring dan supervisi T2 Jumlah fasilitator dengan keterampilan khusus satuan pendidikan luar biasa
T3. Sekolah Darurat Terpadu /sister school→ SMAB perlu mengakomodir konsep sekolah persaudaraan/sister school. Dimasukan dalam pilar 2.	T3. SS3. Sekolah darrat terpadu untuk SD/MI – SMA/SMK, SLB	T3 Sister school/SDT disetiap kecamatan Mengidentifikasi sekolah terdekat, sekolah yangng menjadi tujuan	T3. SDT/sister school di 1 kecamatan minimal 1 unit sebagai sister school dari sekolah korban bencana Membuat kesepakatan dnegan sekolah tujuan
T4. Sekretariat daerah Sekolah aman di setiap daerah di tingkat kabupaten	T4. SS4. Melibatkan BNPB, BPBD, Diknas (TK-SMA), Depag (Madrasah), Dinsos (SLB)	T4 Adanya ketersediaan satu data yang terintegrasikan oleh semua SKPD tentang profil risiko bencana sekolah Sekolah masuk pada RPJMDes Dan RPJMD mengenai pengarusutamaan PRB	T4. Peta rsisiko sekolah aman bencana dapat diakses publik dilengkapi dengna profil sekolah, profil ancaman dan status sekolah apakah sudah SMAB Pelatihan SMAB untukfasilitator lokal baik guru atau masyarakat yang tersertifikasi baik

	Adanya IMB gedung sekolah dan PT yang aman dan aksesibel Adanya sekber di tiap kabupaten kota	pendidikan formal maupun informal (pendidikan bencana) Monitoring SMAB, evaluasi SMAB, Advokasi SMAB, sosialisasi/kampanye SMAB
--	--	--

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
<p>Arah kebijakan 1 dari SS1 – Pengembangan potensi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan yang tangguh dalam menghadapi bencana.</p> <p>Arah kebijakan 1. SS2 Meningkatnya kapasitas fasilitator difabel terkait integrasi PRB dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran.</p> <p>Arah kebijakan 2 dari SS1 – Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran yang aksesibel dan inklusif bagi semua warga komunitas satuan pendidikan.</p>							
Identifikasi pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya lokal terkait keselamatan dan ketangguhan terhadap bencana.	Jumlah kajian yang mendokumentasikan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya selamat dan tangguh terhadap bencana	Identifikasi kajian ilmiah yang pernah dilakukan Kajian ilmiah oleh lembaga yang relevan		Database kajian ilmiah Kajian ilmiah			
Pelatihan penanggulangan bencana di lingkungan satuan pendidikan secara berkala minimal tiap 6 bulan.	Adanya modul standar untuk pelatihan penanggulangan bencana di satuan pendidikan Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana	Penyusunan modul pelatihan standar Pelatihan untuk fasilitator Pelatihan untuk tenaga pendidik Pelatihan untuk staf instansi terkait di daerah		Modul pelatihan standar Fasilitator Sekolah Aman Bencana Tenaga pendidik yang terlatih Staf instansi terkait yang terlatih			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
Mengembangkan model integrasi PRB dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran yang aksesibel dan inklusif bagi semua warga komunitas satuan pendidikan.	Jumlah model integrasi PRB kedalam kurikulum	Identifikasi praktik-praktik baik untuk integrasi PRB dalam proses pembelajaran Penyusunan model-model integrasi PRB kedalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran Penulisan panduan integrasi PRB kedalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran		Database model integrasi PRB Panduan integrasi PRB kedalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran			
Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait integrasi PRB dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran.	Adanya modul pelatihan standar Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan dalam integrasi PRB kedalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran	Penyusunan modul pelatihan standar Pelatihan untuk fasilitator Pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan		Modul pelatihan standar Fasilitator terlatih Guru dan tenaga kependidikan terlatih			
Mempraktikkan integrasi pengetahuan dan keterampilan PRB dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.	Jumlah sekolah yang mempraktikkan integrasi PRB dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran	Sosialisasi model-model integrasi PRB dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran Pengawasan dan evaluasi penerapan integrasi PRB		PRB terdapat dalam RPP PRB terintegrasi dalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran			
Meningkatnya kapasitas fasilitator difabel terkait integrasi PRB dalam	Adanya modul pelatihan standar	Penyusunan modul pelatihan standar		Modul pelatihan standar			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
kurikulum dan/ atau proses pembelajaran.	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan dalam integrasi PRB kedalam kurikulum dan/ atau proses pembelajaran	Pelatihan untuk fasilitator difabel Pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan		Fasilitator difabel terlatih			
Arah kebijakan 1 dari SS2 – Penerapan standar dan pengawasan sarana dan prasarana satuan pendidikan aman dalam pembangunan, rehabilitasi maupun rekonstruksi satuan pendidikan.							
Melakukan penguatan regulasi terkait pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana sekolah yang aman terhadap bencana.	Jumlah kebijakan dan regulasi yang mendukung sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana Seluruh kebijakan dan regulasi yang terkait dengan sarana prasarana di satuan pendidikan selaras dan mendukung perwujudan Sekolah Aman Bencana	Penyusunan naskah akademik untuk kebijakan dan regulasi yang terkait dengan sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana Konsultasi publik terkait naskah akademik dan usulan regulasi Koordinasi dengan pihak terkait untuk penguatan regulasi		Naskah Akademik Notulen konsultasi publik Regulasi baru terkait sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana			
Menyusun sistem penilaian dan pengakuan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar bangunan Sekolah Aman Bencana	Adanya sistem penilaian untuk sarana dan prasarana bangunan Sekolah Aman Bencana	Penyusunan sistem penilaian Konsultasi publik terkait sistem penilaian yang diajukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk pengesahan sistem penilaian		Sistem penilaian yang disahkan Keterlibatan publik dalam penyusunan sistem penilaian			
Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi dan perkuatan	Jumlah sekolah yang melakukan pembangunan, rehabilitasi,	Penyusunan Juknis untuk BOS, DAK, dan program lainnya		Juknis BOS, DAK, dan program lainnya			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
(retrofitting) sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung perlindungan dan proses evakuasi mandiri satuan pendidikan serta melakukan perawatan secara menerus.	rekonstruksi, dan perkuatan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria Sekolah Aman	yang terkait penanggaran untuk konstruksi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan perkuatan sarana dan prasarana Pengadaan bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana Kolaborasi dengan pihak swasta dan mitra pembangunan untuk sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana		terkait sarana dan prasarana Sekolah Aman Bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana Bantuan dari pihak swasta dan mitra pembangunan untuk sarana dan prasarana			
Melakukan pemetaan serta pemantauan dan evaluasi terkait sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana.	Komponen sarana dan prasaran sekolah aman terintegrasi dalam perangkat pemantauan dan evaluasi pendidikan Data pemantuan dan evaluasi sarana dan prasana sekolah aman tersedia dan dapat diakses oleh public	Pemetaan sekolah dan satuan pendidikan lainnya yang rawan terkena bencana Penyesuaian perangkat pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana terkait Sekolah Aman Bencana Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi		Peta sekolah rawan bencana Perangkat pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana yang dimodifikasi Laporan pengawasan dan evaluasi			
Uji ulang sertifikasi laik fungsi bangunan mengacu pada SNI yang relevan (SNI 2012 tentang	Jumlah sekolah yang lulus sertifikasi laik fungsi tentang SNI 2012	Pelaksanaan uji ulang sertifikasi SNI untuk sekolah-sekolah yang berada di		Data sekolah yang memiliki sertifikat SNI			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
bangunan tahan gempa)	bangunan tahan gempa	wilayah rawan gempa					
Penyusunan SNI bangunan untuk jenis ancaman bencana lainnya	Jumlah SNI yang disahkan sesuai dengan jenis ancaman bencana	Penyusunan SNI sesuai dengan jenis ancaman di Indonesia ¹		SNI baru terkait jenis ancaman bencana lainnya			
Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi dan memperkuat (retrofitting) sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung perlindungan dan proses evakuasi mandiri satuan pendidikan serta melakukan perawatan secara menerus.	Jumlah sekolah yang melakukan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan kekuatan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria Sekolah Aman Terpenuhinya kebutuhan mendasar ragam disabilitas, guiding block di fasilitas umum, ram, tenaga juru bahasa isyarat, ethapioning, running text di tv	Penyusunan Juknis untk BOS, DAK, dan program lainnya yang terkait penanggaran untuk konstruksi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan kekuatan sarana dan prasarana Pengadaan bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana Kolaborasi dengan pihak swasta dan mitra pembangunan untuk sarana dan prasarana Sekolah Aman Bencana		Juknis BOS, DAK, dan program lainnya terkait sarana dan prasarana Sekolah Aman Bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana Bantuan dari pihak swasta dan mitra pembangunan untuk sarana dan prasarana			
Arah kebijakan 1 dari SS3 – Penguatan kapasitas kelembagaan terkait penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana.							
Pemetaan kapasitas daerah (provinsi, kabupaten/ kota) untuk penyelenggaraan sekolah darurat	Peta kapasitas daerah untuk penyelenggaraan sekolah darurat	Penyebaran kuesioner kepada dinas pendidikan daerah untuk pemetaan kapasitas		Peta kapasitas penyelenggaraan sekolah darurat			

¹Jenis ancaman bencana yang memiliki frekuensi dan dampak terbesar di Indonesia antara lain: banjir, tanah longsor, tsunami, gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
		<p>Penyebaran kuesioner kepada K/L, mitra pembangunan dan swasta untuk pemetaan kapasitas</p> <p>Konsolidasi dan penyusunan laporan pemetaan kapasitas</p>		Data kapasitas pemerintah, pihak swasta dan mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah			
Menyusun SOP/ Prosedur Tetap (Protap) penyelenggaraan sekolah darurat di tingkat dinas pendidikan provinsi, kabupaten/ kota	Jumlah wilayah yang sudah memiliki SOP/ Protap untuk penyelenggaraan sekolah darurat	<p>Pemetaan wilayah yang sudah memiliki SOP/ Protap</p> <p>Bimbingan teknis untuk penyusunan SOP/ Protap</p> <p>Simulasi untuk menguji SOP/ Protap</p> <p>Koordinasi dengan daerah (Provinsi atau Kabupaten/ kota) untuk pengesahan SOP/ Protap</p>		<p>Peta wilayah yang memiliki SOP/ Protap</p> <p>Staf dinas pendidikan terlatih</p> <p>SOP/ Protap di tingkat daerah</p> <p>Simulasi tanggap darurat di bidang pendidikan tingkat daerah</p>			
Melakukan pelatihan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat di tingkat dinas pendidikan provinsi, kabupaten/ kota	<p>Adanya modul pelatihan standar</p> <p>Jumlah staf dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota yang mengikuti pelatihan</p> <p>Jumlah wilayah yang sudah mengikuti pelatihan</p>	<p>Penyusunan modul pelatihan standar</p> <p>Pelatihan untuk fasilitator</p> <p>Pelatihan untuk staff dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota</p>		<p>Modul pelatihan standar</p> <p>Fasilitator terlatih</p> <p>Staf dinas pendidikan terlatih</p>			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
Melakukan advokasi kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan sekolah darurat	Adanya kebijakan untuk penyelenggaraan sekolah darurat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota Adanya penganggaran kesiapsiagaan dan tanggap darurat penyelenggaraan untuk sekolah darurat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota	Penyusunan panduan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan sekolah darurat Sosialisasi panduan dan pentingnya penyelenggaraan sekolah darurat Pengawasan anggaran kesiapsiagaan dan tanggap darurat di bidang pendidikan di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/ kota		Panduan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan sekolah darurat Instansi terkait paham mengenai pentingnya penyelenggaraan sekolah darurat Laporan pengawasan			
Menyusun model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam situasi bencana	Jumlah model RPP dalam situasi darurat sesuai dengan jenis ancaman bencana	Penyusunan panduan model RPP dalam situasi bencana ²		Panduan penyusunan RPP dalam situasi bencana			
Melakukan pelatihan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat untuk tenaga pendidik	Adanya modul pelatihan standar Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pendidikan darurat	Penyusunan modul pelatihan standar Pelatihan untuk fasilitator Pelatihan untuk tenaga pendidik		Modul pelatihan standar Fasilitator terlatih Tenaga pendidik terlatih			
Pengadaan kebutuhan untuk penyelenggaraan sekolah darurat (dan fasilitas	Jumlah wilayah yang memiliki perlengkapan untuk penyelenggaraan	Pengadaan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan		Bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan sekolah			

²Dibagi menjadi tiga jenis intervensi menyesuaikan dengan karakteristik masa darurat dan pemulihan : jangka pendek (banjir, tanah longsor), menengah (karhutla), panjang (tsunami, gunung berapi, gempa bumi)

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
pendukungnya) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota	n sekolah darurat Jumlah wilayah yang memiliki fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan sekolah darurat	n sekolah darurat dan fasilitas pendukungnya Kolaborasi dengan pihak swasta dan mitra pembangunan untuk penyelenggaraan sekolah darurat dan fasilitas pendukungnya		darurat dan fasilitas pendukungnya Bantuan pihak swasta dan mitra pembangunan untuk penyelenggaraan sekolah darurat dan fasilitas pendukungnya			
Arah kebijakan 2 dari SS3 – Peningkatan koordinasi dan sinergi Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan kebencanaan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana.							
Melakukan penguatan mekanisme koordinasi Sekretariat Sekolah Aman dengan lembaga terkait kebencanaan di pusat dengan melakukan MoU antar K/L dan mitra pembangunan.	Jumlah kegiatan bersama lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Sekolah Aman Jumlah MOU antar K/L dan mitra pembangunan	Identifikasi kegiatan terkait penyelenggaraan sekolah darurat yang dilaksanakan oleh K/L dan mitra pembangunan Penyusunan MOU antar K/L dan mitra pembangunan		Kalender kegiatan terkait penyelenggaraan sekolah darurat MOU antar K/L dan mitra pembangunan			
Melakukan penguatan tatakelola, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di sektor pendidikan.	Jumlah wilayah yang memiliki penyelenggaraan penanggulangan bencana di sektor pendidikan yang transparan dan akuntabel	Sosialisasi SOP dan Protap penyelenggaraan sekolah darurat ke instansi dan mitra pembangunan terkait Pengawasan dan evaluasi bersama saat implementasi penyelenggaraan sekolah darurat		Instansi dan mitra pembangunan terkait paham mengenai SOP dan Protap yang ada Laporan pengawasan dan evaluasi bersama			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
Melakukan bimbingan teknis dalam penilaian mandiri secara partisipatif paska bencana	Adanya modul pelatihan standar Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan teknis Jumlah wilayah yang mendapatkan bimbingan teknis Jumlah sekolah yang melakukan penilaian mandiri Jumlah wilayah dimana sekolahnya melakukan penilaian mandiri secara partisipatif paska bencana	Pemutakhiran perangkat penilaian mandiri secara partisipatif paska bencana Penyusunan modul pelatihan standar Pelatihan untuk fasilitator Pelatihan untuk tenaga pendidikan		Perangkat penilaian mandiri secara partisipatif Modul pelatihan standar Fasilitator terlatih Tenaga pendidikan terlatih			
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi implementasi sekolah darurat	Jumlah sekolah darurat yang beroperasi Jumlah hari tidak sekolah karena situasi darurat Jumlah siswa yang tidak sekolah karena situasi darurat	Pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk implementasi penyelenggaraan sekolah darurat		Laporan pengawasan dan evaluasi			
Arah kebijakan 1 dari SS4 – Pengarusutamaan informasi dan pengetahuan pengurangan risiko bencana dalam penyelenggaraan pendidikan.							
Kajian Ilmiah mengenai risiko bencana di bidang pendidikan (nasional, provinsi, kabupaten/ kota)	Jumlah wilayah (provinsi dan kabupaten/ kota) yang telah memiliki kajian ilmiah risiko bencana di	Kajian Ilmiah mengenai risiko bencana di bidang pendidikan (nasional, provinsi,		Kajian ilmiah			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
	bidang pendidikan	kabupaten/ kota)					
Sosialisasi kebijakan, regulasi, program, dan praktik-praktik baik mengenai Sekolah Aman Bencana dan budaya sadar bencana oleh pendidik dan tenaga kependidikan ke warga sekolah (i.e. Sosialisasi di daerah, Roadshow di sekolah, Sosialisasi bersama media massa, Diskusi di media, Sesi pembelajaran, Artikel)	<p>Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi</p> <p>Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan sosialisasi</p> <p>Jumlah wilayah yang mengikuti kegiatan sosialisasi</p> <p>Jumlah media massa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi</p> <p>Jumlah artikel yang dihasilkan</p> <p>Jumlah sesi pembelajaran yang diselenggarakan</p> <p>Jumlah media mitra SekNas Sekolah Aman Bencana</p>	<p>Penyusunan strategi komunikasi untuk kampanye Sekolah Aman Bencana</p> <p>Pengadaan materi KIE terkait Sekolah Aman Bencana yang mengikuti standar minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana</p> <p>Sosialisasi kebijakan, regulasi, program dan perangkat terkait Sekolah Aman Bencana kepada K/L, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota, serta di tingkat satuan pendidikan</p> <p>Inisiasi kerjasama dengan media massa, pihak swasta, dan mitra pembangunan terkait sosialisasi Sekolah Aman Bencana</p> <p>Penyusunan artikel dan penyelenggaraan sesi pembelajaran</p>		<p>Strategi komunikasi untuk Kampanye Sekolah Aman Bencana</p> <p>Materi KIE Sekolah Aman Bencana</p> <p>Warga sekolah paham akan kebijakan, regulasi, program dan perangkat terkait Sekolah Aman Bencana</p> <p>MOU antar media massa, pihak swasta dan mitra pembangunan terkait sosialisasi</p> <p>Artikel terkait Sekolah Aman Bencana</p> <p>Sesi pembelajaran terkait Sekolah Aman Bencana</p>			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
		yang mengikuti standar minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana					
Penyusunan standard minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana	Adanya standar minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana	<p>Kajian ilmiah mengenai standar minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana</p> <p>Lokakarya untuk perumusan standar minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana</p> <p>Pengujian standar minimum pesan-pesan PRB dan Sekolah Aman Bencana</p>		<p>Kajian ilmiah</p> <p>Instansi dan mitra pembangunan terkait terlibat dalam penyusunan standar minimum pesan-pesan</p> <p>Standar minimum pesan-pesan PRB dan sekolah aman bencana</p>			
Pengumpulan dan konsolidasi media-media KIE yang berhubungan dengan satuan pendidikan	Adanya database media-media KIE yang dapat diakses oleh public	<p>Identifikasi media KIE yang sudah diproduksi oleh K/L dan mitra pembangunan</p> <p>Pembentukan database daring untuk media KIE yang dapat diakses oleh publik</p>		Database media KIE			
Kompetisi Nasional materi terkait edukasi PRB dan Sekolah Aman Bencana	Materi terkait edukasi PRB dan Sekolah Aman Bencana	Penyelenggaraan Kompetisi Nasional		Kompetisi Nasional			
Penyebaran materi edukasi PRB dan Sekolah Aman Bencana melalui	Adanya Website terkait Sekolah Aman Bencana	Pembentukan website Seknas Sekolah Aman Bencana		Website Seknas			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
website dan media sosial	Jumlah posting di media sosial Jumlah orang yang mengakses website	Pengunggahan materi KIE di website Seknas dan dapat diakses oleh publik Kampanye materi PRB dan Sekolah Aman Bencana secara berkala di media sosial		Materi KIE diunggah di website Kampanye di media sosial			
Pemilihan Duta Sekolah Aman Bencana	Jumlah duta sekolah aman bencana Jumlah kegiatan yang melibatkan duta sekolah aman bencana	Penyusunan kriteria duta sekolah aman Pemilihan duta sekolah aman		Duta Sekolah Aman Bencana			
Pelaksanaan Festival dan Konferensi Nasional Sekolah Aman Bencana setiap tahun	Jumlah sekolah yang terlibat Jumlah wilayah yang terlibat Jumlah peserta yang terlibat Ragam inovasi praktik-praktik baik dalam sekolah aman bencana	Penyelenggaraan Festival dan Konferensi Nasional Sekolah Aman Bencana		Festival dan Konferensi Nasional Sekolah Aman Bencana			
Arah kebijakan 2 dari SS4 – Pengupayaan penurunan tingkat risiko bencana di tingkat satuan pendidikan.							
Penyusunan Peraturan Mendikbud tentang Sekolah Aman Bencana	Adanya Peraturan Mendikbud tentang Sekolah Aman Bencana	Penyusunan naskah akademik untuk Permendikbud Sekolah Aman Bencana Penyusunan draf Permendikbud Konsultasi publik untuk draf Permendikbud		Naskah Akademik Permendikbud Sekolah Aman Bencana			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
		Pengesahan draf Permendikbud Sekolah Aman Bencana					
Melakukan pemetaan risiko bencana di satuan pendidikan.	Jumlah sekolah yang memiliki peta risiko bencana	Pembuatan peta risiko bencana sekolah		Peta risiko bencana sekolah			
Pembentukan tim siaga bencana di tingkat komunitas satuan pendidikan (dapat dimasukkan ke dalam OSIS, ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, Komite Bencana dan Keselamatan Satuan pendidikan, dsb.)	Jumlah sekolah yang memiliki tim siaga bencana	Pembentukan tim siaga bencana di tingkat sekolah		Tim Siaga Bencana			
Melakukan identifikasi kebutuhan perangkat keselamatan di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan jenis risiko bencana.	Jumlah sekolah yang memiliki perangkat keselamatan	Melakukan identifikasi kebutuhan perangkat keselamatan di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan jenis risiko bencana.		Data kebutuhan perangkat keselamatan di sekolah			
Menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dan protap di satuan pendidikan	Jumlah sekolah yang memiliki RPB dan Protap saat darurat	Menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dan protap di satuan pendidikan		RPB dan protap di satuan pendidikan			
Melakukan simulasi bencana yang berkala di tingkat satuan pendidikan	Jumlah sekolah yang melakukan simulasi bencana yang berkala (minimal 2 kali setiap tahun)	Melakukan simulasi bencana minimal 2 kali setiap tahun		Simulasi bencana			
Mengintegrasikan komponen sekolah aman bencana ke dalam akreditasi dan evaluasi diri di satuan pendidikan	Komponen sekolah aman terdapat di panduan dan form akreditasi sekolah	Pengintegrasian komponen Sekolah Aman Bencana kedalam perangkat		Perangkat akreditasi dan evaluasi diri sekolah yang telah dimodifikasi			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
	<p>Komponen sekolah aman terdapat di perangkat evaluasi diri sekolah</p> <p>Jumlah pengawas yang dapat menggunakan perangkat</p>	akreditasi dan evaluasi diri sekolah					
Melakukan bimbingan teknis untuk satuan pendidikan dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah	<p>Adanya modul standar pelatihan</p> <p>Jumlah sekolah yang dapat melakukan evaluasi diri sekolah yang mengintegrasikan sekolah aman bencana</p>	<p>Penyusunan modul standar pelatihan</p> <p>Pelatihan untuk fasilitator</p> <p>Pelatihan untuk pengawas sekolah</p> <p>Sosialisasi perangkat evaluasi diri sekolah dan akreditasi yang sudah dimodifikasi</p>		<p>Modul standar pelatihan</p> <p>Fasilitator terlatih</p> <p>Pengawas sekolah terlatih</p> <p>Warga sekolah paham mengenai evaluasi diri sekolah dan akreditasi yang baru</p>			
Penyelarasan Sekolah Aman Bencana ke dalam kegiatan Kementerian/ Lembaga yang relevan	<p>Jumlah kegiatan terkait Sekolah Aman Bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang relevan</p> <p>Jumlah Kementerian, Lembaga, dan Mitra yang menyepakati Rencana Aksi/ Roadmap Sekolah Aman Bencana</p>	<p>Koordinasi antar K/L</p> <p>Penyusunan kalender kegiatan terkait Sekolah Aman Bencana antar K/L</p>		Kegiatan Sekolah Aman Bencana dapat diselaraskan dengan program Kementerian dan Lembaga terkait			

Kegiatan Utama	Indikator Terukur	Tahap Pelaksanaan	Tenggat Waktu	Output	Mitra (K/L, NGO/ LSM, lembaga PBB, lembaga Donor)		
					Program	Tahap/ Progress	Lokasi
Melakukan bimbingan teknis untuk pembentukan Sekretariat Sekolah Aman Bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota	Jumlah Sekretariat Sekolah Aman Bencana yang terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota	<p>Bimbingan teknis untuk instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota</p> <p>Sosialisasi Permendikbud Sekolah Aman bencana</p> <p>Bimbingan teknis untuk pengurus Sekretariat Sekolah Aman Bencana di tingkat daerah</p>		<p>Sekretariat Sekolah Aman Bencana di tingkat daerah</p> <p>Pemerintah daerah paham akan pentingnya Sekolah Aman Bencana</p> <p>Komitmen untuk mendukung program Sekolah Aman Bencana di tingkat daerah</p>			

Magelang, 24 Agustus 2017

Tim Perumus

Penyelenggara



Presidium KPB



Didukung oleh

